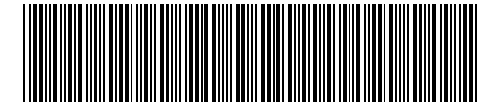




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409207/2022**



DS:2241-0760-0558-2509

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 1.854.757.000 (SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.854.757.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 1.854.757.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022



DS:2241-0760-0558-2509

Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	148.737.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	148.737.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.706.020.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.706.020.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			148.737.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			148.737.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	39.720.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	39.720.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	109.017.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	109.017.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.706.020.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.706.020.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	164.748.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	72.528.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	92.220.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		14,00	Lembaga	85.068.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		14,00	Lembaga	85.068.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan	104.144.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Fasilitasi JDIHN		5,00	Lembaga	73.224.000
		:	02 BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum		1,00	Layanan	30.920.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		145,00	Orang	1.160.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	145,00	Orang/Kasus	1.160.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		18,00	Kelompok Masyarakat	192.060.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	18,00	Kegiatan	192.060.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	1.854.757	-	-	-	1.854.757		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	148.737	-	-	-	148.737		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	148.737	-	-	-	148.737		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	39.720	-	-	-	39.720	20 . 51	
01	RM	-	39.720	-	-	-	39.720	060	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	109.017	-	-	-	109.017	20 . 51	
01	RM	-	109.017	-	-	-	109.017	060	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.706.020	-	-	-	1.706.020		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.706.020	-	-	-	1.706.020		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	164.748	-	-	-	164.748	20 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	164.748	-	-	-	164.748	060	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	85.068	-	-	-	85.068	20 . 51	
01 RM		-	85.068	-	-	-	85.068	060	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	104.144	-	-	-	104.144	20 . 51	
01 RM		-	104.144	-	-	-	104.144	060	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	1.160.000	-	-	-	1.160.000	20 . 51	
01 RM		-	1.160.000	-	-	-	1.160.000	060	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	192.060	-	-	-	192.060	20 . 51	
01 RM		-	192.060	-	-	-	192.060	060	
JUMLAH		-	1.854.757	-	-	-	1.854.757		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

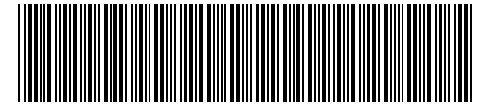
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	132.591	167.949	185.758	156.171	133.417	165.779	177.352	153.972	160.259	115.571	156.991	148.947	1.854.757
		BELANJA BARANG	132.591	167.949	185.758	156.171	133.417	165.779	177.352	153.972	160.259	115.571	156.991	148.947	1.854.757
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	0	0	0	5.476	1.500	37.503	26.331	28.368	600	35.160	13.799	148.737
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	5.476	1.500	37.503	26.331	28.368	600	35.160	13.799	148.737
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	132.591	167.949	185.758	156.171	127.941	164.279	139.849	127.641	131.891	114.971	121.831	135.148	1.706.020
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	132.591	167.949	185.758	156.171	127.941	164.279	139.849	127.641	131.891	114.971	121.831	135.148	1.706.020

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
IV A. B L O K I R**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [409207] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

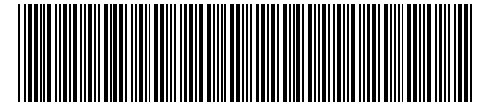
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:2241-0760-0558-2509

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [409207] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001